

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari resistensi pemerintahan Duterte terhadap protes masyarakat sipil dan komunitas internasional terkait kebijakan War on Drugs yang diterapkan antara tahun 2016 hingga 2022 di Filipina. Pemerintahan Duterte telah menunjukkan ketahanan terhadap tekanan domestik dan internasional dalam menanggapi kritik terhadap kebijakan anti-narkoba mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi ini meliputi, dominasi politik yang kuat, populisme yang mendalam, pandangan otoritarian, serta legitimasi yang didapat dari sebagian masyarakat Filipina, menjadi pijakan utama yang memperkuat resistensi pemerintah. Selain itu, faktor eksternal seperti kedaulatan negara juga menjadi landasan yang menguatkan sikap tegas pemerintah Filipina dalam menolak campur tangan eksternal. Dalam konteks sejarah, Filipina telah mengalami berbagai tantangan terkait narkoba, juga memainkan peran penting dalam menjustifikasi kebijakan tersebut. Analisis faktor-faktor ini membantu memahami mengapa Pemerintahan Duterte dapat bertahan dan menolak tuntutan protes dan kritik dari masyarakat sipil dan komunitas internasional terkait kebijakan War on Drugs mereka. Penelitian ini merangsang diskusi lebih lanjut mengenai dinamika politik dan faktor-faktor yang mendukung ketahanan suatu pemerintahan terhadap tekanan eksternal dan internal dalam menghadapi kebijakan kontroversial.

ABSTRACT

This research explores the underlying factors of the Duterte government's resistance toward civil society and the international community's protests regarding the War on Drugs policy implemented between 2016 and 2022 in the Philippines. The Duterte administration has demonstrated resilience to domestic and international pressure in responding to criticism of its anti-drug policies. Factors influencing this resistance include strong political dominance, deep-rooted populism, authoritarian outlook, and legitimacy obtained from some parts of Filipino society, which are the main foundations that strengthen government resistance. External factors such as state sovereignty also strengthen the Philippine government's firm stance in rejecting external interference. In historical context, the Philippines has experienced various drug-related challenges, which play an important role in justifying these policies. Analysis of these factors helps understand why the Duterte government was able to persist and resist the demands of protest and criticism from civil society and the international community regarding their War on Drugs policies. This research stimulates further discussion regarding political dynamics and factors that support a government's resilience to external and internal pressures in encountering controversial policies.